

ASIMILASI ETNIS TIONGHOA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL (Studi di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara)

Mustaqfirin¹ dan Kodiran²

Keanekaragaman etnis dan budaya di Indonesia merupakan kebanggaan, namun tidak jarang juga menimbulkan permasalahan. Di antara permasalahan terkait suku-bangsa adalah apa yang disebut dengan "masalah Tionghoa". Timbulnya masalah Tionghoa (Suryadinata, 2010: 184-186) lebih disebabkan karena adanya persepsi negatif terhadap orang Tionghoa. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah Tionghoa dalam rangka mewujudkan integrasi nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan asimilasi. Asimilasi bagi etnis Tionghoa berarti masuk dalam budaya masyarakat setempat, sehingga ciri semula yang khas sebagai orang Tionghoa tidak ada lagi.

Dalam menyikapi kebijaksanaan asimilasi, kalangan etnis Tionghoa terbagi dalam dua kelompok (Leo Suryadinata, 2005:xii-xiii) yaitu; asimilasionis dan pluralis (integrasionis). Kelompok asimilasionis berupaya untuk menggabungkan anggota subordinat (minoritas) ke dalam masyarakat superordinat (mayoritas) dengan cara mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok superordinat, sedangkan kelompok pluralis menghendaki agar kelompok subordinat tetap diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Dalam konteks ini, kelompok subordinat memiliki kecenderungan bersifat sentripetal (asimilasionis), sedangkan kelompok superordinat cenderung bersifat sentrifugal (pluralis).

¹ Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

² Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM

Keberadaan etnis Tionghoa di suatu wilayah sering kali diposisikan sebagai kelompok subordinat. Dilihat dari segi jumlah (*size*) maupun kekuasaan (*power*) yang dimiliki, adalah kurang tepat apabila menempatkan mereka pada posisi minoritas. Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai misalnya, jumlah mereka mencapai 9,33 % dan memiliki kekuasaan ekonomi yang dominan. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk meneliti asimilasi etnis Tionghoa sebagai kelompok superordinat, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana implikasinya terhadap integrasi nasional.

A. Bentuk-bentuk Asimilasi Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa diperkirakan datang ke Kota Tanjungbalai pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Pada awal kedatangannya, mereka dihadapkan pada kendala interaksi terutama karena perbedaan budaya dan bahasa masyarakat setempat. Menyikapi hal ini, beberapa orang Tionghoa yang tergabung dalam *Han Siong Kiok* (Perkumpulan Pedagang Asahan) berinisiatif membangun sebuah sekolah (tahun 1900) yang diberi nama *Pai San School* (sekarang Perguruan Sisingamangaraja). Tujuannya adalah untuk mempelajari budaya

dan bahasa setempat (bahasa Melayu), sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam berinteraksi.

Saat ini etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai merupakan generasi keturunan, dan sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Mereka melakukan asimilasi dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

Asimilasi Kebudayaan, Asimilasi kebudayaan (*Cultural Assimilation*) merupakan bentuk asimilasi yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan etnis mayoritas. Boleh jadi perubahan pola-pola kebudayaan tersebut tidak bersifat menyeluruh, dalam pengertian etnis Tionghoa tetap memiliki ciri khas mereka. Elemen-elemen yang termasuk asimilasi kebudayaan adalah; Pertama, penggunaan bahasa. Pada umumnya etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai berkomunikasi dengan dua bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa Hokkien. Bahasa Indonesia digunakan ketika berkomunikasi dengan etnis lain, sedangkan bahasa Hokkien digunakan untuk berkomunikasi antar sesama etnis Tionghoa. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Hokkien di tempat-tempat umum (seperti pasar, pertokoan, hotel, dan lain-lain) tanpa merasa *sungkan*, meskipun pada

saat itu ada etnis pribumi yang mendengar atau melihatnya.

Kedua, cara berpakaian. Model pakaian yang dikenakan etnis Tionghoa sama dengan model pakaian etnis pribumi. Mereka tidak lagi menggunakan baju *koko*, mengenakan topi, dan menguncir rambut sebagaimana cara berpakaian leluhur mereka. Satu-satunya orang Tionghoa yang masih berpakaian seperti itu adalah *suhu* vihara Arya Satyani.

Ketiga, makanan khas. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah makanan yang dipercaya berasal dari daratan Tiongkok, dan kemudian "berakulturasi" dengan makanan setempat, misalnya *tauco*. *Tauco* adalah makanan pelengkap yang biasa disajikan pada masakan Jawa, namun mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa. Di Kota Tanjungbalai, *tauco* dapat dikatakan sebagai "makanan wajib", karena selalu dihidangkan pada acara-acara seremonial, misalnya pesta pernikahan.

Keempat, seremoni. Dalam konteks ini, yang dimaksud seremoni/ritus adalah acara-acara tradisi yang dilakukan secara periodik, seperti perayaan Natal, *Lebaran* (Idul Fitri). Pada kedua hari raya tersebut, berlaku tradisi saling mengunjungi dan memberikan ucapan selamat kepada mereka yang merayakannya. Dalam beberapa tahun

terakhir ini, perayaan Imlek juga mengadopsi tradisi Natal dan Idul Fitri. Masyarakat dari kalangan pribumi berkunjung ke rumah-rumah etnis Tionghoa untuk memberikan ucapan "Selamat Tahun Baru Imlek".

Kelima, konversi agama. Pada umumnya, etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai adalah penganut Konghucu. Konversi agama dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 (tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa). Mereka sebagian besar berpindah agama menjadi pemeluk Budha karena dianggap memiliki banyak kemiripan cara peribadatan dengan Konghucu.

Asimilasi Struktural, Asimilasi struktural (*Structural Assimilation*) dalam konteks ini diartikan sebagai masuknya kelompok etnis minoritas ke dalam klik-klik dan pranata sosial kelompok primer atau etnis mayoritas pribumi (J.R. Feagin & C.B. Feagin, dalam Idi, 2010 : 108), meliputi elemen ekonomi, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Pada elemen ekonomi, mereka tidak lagi identik sebagai pedagang, tetapi sudah banyak yang berprofesi di bidang konstruksi dan jasa, menjadi nelayan, bahkan petani.

Pada elemen pendidikan, mereka bebas memilih sekolah-sekolah yang diinginkan,

namun pada umumnya mereka lebih memilih bersekolah di Perguruan Sisingamangaraja yang merupakan sekolah warisan leluhur mereka. Sementara itu pada elemen sosial-kemasyarakatan, asimilasi etnis Tionghoa diwujudkan melalui partisipasi sosial, seperti kerja bakti, ikut menjaga keamanan lingkungan, dan menghadiri berbagai undangan dari etnis lain, misalnya pesta pernikahan.

Asimilasi Perkawinan (Amalgamasi), Amalgamasi (perkawinan campur) merupakan penyatuan kelompok etnis yang berbeda secara biologis melalui perkawinan. Amalgamasi antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi sangat jarang terjadi. Rendahnya tingkat amalgamasi ini disebabkan oleh dua faktor; agama dan keluarga. Etnis Tionghoa yang melakukan amalgamasi secara otomatis akan berpindah agama, dan apabila ini terjadi maka mereka akan dikucilkan bahkan dikeluarkan dari keanggotaan keluarga. Oleh karena itu amalgamasi sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah "di bawah tangan") dari pada secara terang-terangan.

Mereka yang melakukan amalgamasi secara sembunyi-sembunyi pada umumnya adalah para *toke* (pengusaha kaya). Perempuan pribumi yang

dinikahi biasanya dibuatkan rumah di luar Kota Tanjungbalai. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi dan nama baik si *toke*. Amalgamasi yang dilakukan secara terang-terangan, di antaranya adalah perkawinan antara Sie Tjiok Yong dengan Tengku Denian (putera Sultan Syaibun/Sultan ke-5 dari Kesultanan Tanjungbalai-Asahan).

Asimilasi Identifikasi, Asimilasi identifikasi bertalian dengan tidak adanya prasangka sosial. Pada masyarakat plural, prasangka bisa muncul kapan saja, dan biasanya terkait dengan penggunaan istilah-istilah (*stereotype*) yang menyudutkan salah satu etnis. Di Kota Tanjungbalai ada beberapa stereotip yang bisa menimbulkan ketersinggungan bagi etnis tertentu. Istilah *ngenthir* atau *kenthir* misalnya, adalah stereotip yang ditujukan kepada etnis Melayu untuk menunjukkan kekolotannya. Istilah "Orang Batak" adalah stereotip bagi etnis Batak yang beragama non-Islam (Nasrani), sedangkan mereka yang beragama Islam disebut muslim atau Melayu. Stereotip bagi etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai adalah "Cina-Tanjung". Stereotip ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi mereka yang hanya mementingkan

keuntungan secara materi.

Prasangka sosial dalam bentuk stereotip tersebut jarang terjadi di Kota Tanjungbalai, walaupun ada, sifatnya temporal dan insidental. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum etnis Tionghoa mampu mengidentifikasi diri ke dalam masyarakat pribumi. Sebaliknya, jika mereka gagal dalam pengidentifikasian diri maka prasangka sosial dan stereotip akan kembali muncul. Untuk mengurangi prasangka sosial, stereotip negatif, dan diskriminasi, asimilasi dapat dilakukan dalam bentuk sikap dan perilaku (Liliweri, 2005). Namun dalam konteks ini, etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai memiliki kecenderungan sentrifugal. Artinya, mereka ingin tetap mempertahankan ciri khas sebagai etnis Tionghoa sebagaimana etnis-etnis pribumi lainnya.

Asimilasi civic, Asimilasi *civic* atau kewarganegaraan adalah asimilasi yang dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai dasar kebudayaannya ke dalam arena politik, pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara (Liliweri, 2005 : 138 - 139), sehingga tidak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan (Patji, 2010 : 5). Artinya, etnis Tionghoa sebagai bagian dari

bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua bidang kehidupan.

Dalam konteks ini, asimilasi etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari elemen politik. Pasca jatuhnya Orde Baru, hak politik mereka mulai diakui. Tepatnya pada tahun 2002, beberapa orang etnis Tionghoa mulai aktif menjadi pengurus partai politik (PKPI, PDIP dan Gerindra, Golkar). Sejak pemilu legislatif tahun 2004, beberapa politisi dari kalangan etnis Tionghoa mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPRD. Mereka adalah Dhoni Dharma Putra/Tan Hok Min dari PKPI (periode 2004-2009) dan Hakim Tjoa Kien Lie dari PDIP (periode 2004-2009 dan 2009-2014).

B. Hambatan-hambatan Asimilasi

Asimilasi etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu; pertama adanya perasaan superior. Mereka merasa lebih superior atas pribumi karena dominasi ekonomi. Di samping itu, perasaan ini juga merupakan warisan kolonial yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai Orang Timur Asing yang derajatnya lebih tinggi daripada etnis pribumi

(*inlanders*). Kedua, posisi sebagai kelompok mayoritas. Dalam paradigma kelompok subordinat dan superordinat (Schermerhorn, 1970 : 13), kelompok superordinat (mayoritas) memiliki kecenderungan bersifat sentrifugal.

Ketiga, keanekaragaman etnis dan budaya di Kota Tanjungbalai. Kondisi ini menyebabkan etnis Tionghoa mengalami kesulitan dalam berasimilasi, karena masing-masing etnis memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan ciri khas etnis mereka. Keempat, permasalahan vihara Tri Ratna. Pada dasarnya permasalahan itu muncul berkaitan masih adanya prasangka sosial dan stereotip terhadap etnis Tionghoa. Pemicunya adalah keberadaan patung Budha Amitabha setinggi enam meter di atas atap vihara Tri Ratna, yang (oleh sebagian masyarakat) dianggap menodai ciri khas Kota Tanjungbalai, yaitu berbudaya Melayu (Islam).

C. Implikasi Asimilasi Terhadap Integrasi Nasional

Dalam konteks integrasi nasional, kebijaksanaan asimilasi dimaksudkan untuk mempersatukan keanekaragaman suku-bangsa. Oleh karenanya asimilasi memiliki implikasi terhadap

elemen-elemen integrasi yang terangkum dalam *panca gatra*, yaitu; ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan.

Implikasi Terhadap Integrasi Ideologi, Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dianggap senantiasa menimbulkan masalah, tetapi "masalahnya" tidak pernah sama (Suryadinata, 2002 : 18). Pada jaman kolonial, mereka dianggap pro-Belanda dan anti nasionalisme. Kemudian mereka dianggap unsur komunis atau simpatisan komunis. Oleh karena itu Aimee Dawis (2009 : 111) melihat bahwa asimilasi merupakan usaha sistematis guna menghapus kebudayaan dan adat istiadat Tionghoa dalam memusnahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunisme.

Dalam rangka mengintegrasikan ideologi etnis Tionghoa ke dalam ideologi Pancasila, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Krp/1968 tentang penggantian nama; Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang kebijakan utama berkaitan dengan warga negara keturunan asing (Tionghoa); dan Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/In/6/1967 tentang kebijakan utama penyelesaian masalah Tionghoa (Suhandinata, 2009 : 229). Meskipun menimbulkan banyak perdebatan, dan pada

sisi lain dirasakan kurang adil oleh etnis Tionghoa, pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut mampu merealisasikan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang harus dianut oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implikasi Terhadap Integrasi Politik, Dalam rangka *nation-building*, integrasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk menggalang persatuan. Integrasi politik meliputi; *national integration, territorial integration, elite-mass integration, values integration, dan integrative behavior* (Wiener, dalam Suryadinata, 2010 : 245-246). Secara politis, integrasi nasional Indonesia dimaksudkan untuk menguasai (mempersatukan) wilayah teritori, mempersatukan suku-bangsa, mempersatukan visi dan misi antara elite dan massa. Apabila nilai-nilai integrasi itu sudah terlaksana, maka akan terjadi tingkah laku yang integratif, dan suku bangsa yang berbeda-beda itu tidak lagi mempunyai tingkah laku politik yang berlawanan.

Orientasi dan sikap politik etnis Tionghoa diwujudkan dengan cara memilih partai politik yang bersifat terbuka, yaitu partai politik yang berbasis nasionalis kebangsaan. Dalam hal ini Anderson (1983 : 15-16)

melihat bahwa etnis Tionghoa bersama etnis pribumi lain, sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined political community*) akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan memerintah.

Implikasi Terhadap Integrasi Ekonomi, Dalam bidang ekonomi etnis Tionghoa selalu diidentikkan dengan profesi sebagai pedagang yang dalam menjalankan bisnisnya, menerapkan sistem *cukong*. *Cukong* dalam dialek Hokkien berarti majikan. Istilah itu digunakan untuk mengacu kepada seorang usahawan etnis Tionghoa yang bekerjasama dengan anggota elite penguasa. Sang *cukong* menyediakan ketrampilan menjalankan usaha dan kadang-kadang modal, sedangkan elite penguasa memberikan perlindungan dan berbagai fasilitas kepadanya (Suryadinata, 2002 : 129).

Di Kota Tanjungbalai, *cukong* dikenal dengan istilah *toke*. Istilah *toke* digunakan untuk menyebut pedagang kaya dari kalangan etnis Tionghoa. Namun pasca Orde Baru, para *toke* mulai mengembangkan usaha di bidang lain terutama pertanian

(perikanan dan perkebunan). Karena mereka tidak memiliki pengalaman pada sektor ini, mereka bekerjasama dengan penduduk setempat (pribumi) untuk mengelola usahanya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hubungan saling menguntungkan (symbiosis mutualisme) antara etnis Tionghoa sebagai *toke* dan etnis pribumi sebagai pengelola. Suhandinata (2009 : 235) melihat bahwa persebaran etnis Tionghoa ke semua sektor, dapat mengembangkan rasa persatuan sebagai orang Indonesia.

Implikasi Terhadap Integrasi Sosial-Budaya, Dalam konteks ini, elemen integrasi sosial-budaya meliputi; pendidikan, adat istiadat, dan agama. Leo Suryadinata (2002 : 16) melihat dalam hal integrasi budaya, gerakan asimilasi dimaksudkan untuk mengikis habis kebudayaan Tionghoa. Kebijakan konversi agama diberlakukan, sekolah-sekolah Tionghoa dibekukan dan diganti menjadi sekolah swasta nasional, penggunaan bahasa Tionghoa dan koran-koran berbahasa Tionghoa dilarang. Akibatnya, orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1966 hanya bisa menulis dan berbicara dengan bahasa Indonesia.

Dalam hal agama, mereka melakukan konversi agama terutama dengan berpindah

menjadi pemeluk Budha. Dalam bidang pendidikan, *Pai San School* yang merupakan sekolah Tionghoa dijadikan sebagai sekolah swasta nasional dengan nama Perguruan Sisingamangaraja. Namun demikian, ciri khas sebagai etnis Tionghoa masih dapat dilihat dalam hal bahasa dan adat istiadat. Mereka masih menggunakan bahasa Tionghoa (Hokkien) ketika berkomunikasi dengan sesama etnis Tionghoa. Pada sisi lain mereka juga masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi Tionghoa, misalnya ritual pemujaan leluhur.

Terlepas dari itu semua, asimilasi etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai telah menambah kekayaan budaya, meskipun belum menghasilkan kebudayaan baru. Integrasi budaya diwujudkan dengan cara pertukaran seni budaya. Misalnya, tari *Tor-Tor* yang merupakan kebudayaan etnis Batak diundang untuk tampil pada acara peresmian Vihara Tri Ratna (tanggal 9 Nopember 2009), sedangkan para penarinya adalah para pemuda Tionghoa yang tergabung dalam PMVTR (Persatuan Muda Mudi Vihara Tri Ratna). Sebaliknya, kesenian Barongsai juga sering diundang untuk tampil pada acara-acara seremoni, seperti pesta perkawinan. Menariknya, para

pemain Barongsai tersebut adalah para pemuda dari kalangan pribumi.

Implikasi Terhadap Integrasi Keamanan, Indonesia adalah negara multi-etnis. Karena etnisitas mengandung sifat memecah-belah (Suryadinata, 1999 : 1), maka pemerintah Indonesia mengelola masyarakat multi-etnis tersebut melalui strategi integrasi nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah bangsa (*nation*) berdasarkan batas negara yang ada. Dalam rangka membangun sebuah bangsa dengan batas yang ada itu, salah satu perangkat yang digunakan adalah Undang-Undang Kewarganeraan. Undang-undang ini dibuat terkait dengan semakin banyaknya orang Tionghoa asing di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1980 (Suryadinata, 1999 : 177), terdapat sekitar 3,5 juta orang Tionghoa di Indonesia, 914.000 orang adalah warga negara RRC, 122.000 orang 'tanpa kewarganegaraan', dan 1.907 orang lainnya berkewarganeraan Taiwan.

Pemerintah Indonesia khawatir dengan kehadiran orang Tionghoa asing yang sangat banyak itu menimbulkan risiko terhadap keamanan, dan pada sekala yang lebih luas dapat mengancam integrasi nasional. Orang-orang Tionghoa

asing itu harus "diasimilasikan" status kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2/1980 dan Keputusan Presiden No. 13/1980 tentang kewarga negaraan orang Tionghoa asing. Akibatnya banyak orang Tionghoa asing yang memohon menjadi warga negara Indonesia. Meskipun kebijaksanaan ini tidak serta merta menuntaskan masalah Tionghoa, paling tidak dengan menjadi warga negara Indonesia dapat mengurangi timbulnya risiko keamanan.

D. Kesimpulan

Kebijaksanaan asimilasi dimaksudkan sebagai solusi terhadap masalah Tionghoa. Namun karena kondisi sosial etnis Tionghoa berbeda di masing-masing wilayah, maka bentuk-bentuk asimilasi dan tingkat keberhasilannya juga berbeda. Secara umum, tingkat asimilasi etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai berlangsung cukup tinggi terutama dalam bentuk asimilasi kebudayaan, asimilasi struktural, asimilasi identifikasi, dan asimilasi *civic*. Sementara itu hal-hal yang menghambat asimilasi lebih bersifat internal, yaitu; masih adanya perasaan superior, dan posisi status

sosial dan dominasi ekonomi; sedangkan faktor eksternal berupa keanekaragaman etnis, dan adanya prasangka sosial.

Tingkat asimilasi etnis Tionghoa yang cukup tinggi memiliki implikasi positif bagi terwujudnya integrasi nasional di wilayah Kota Tanjungbalai. Dalam konteks ini, asimilasi etnis Tionghoa dapat mewujudkan kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya, dan kesatuan keamanan di wilayah Kota Tanjungbalai yang pada gilirannya akan berpengaruh bagi terwujudnya integrasi secara nasional. Akhirnya, asimilasi adalah sebuah pilihan bagi etnis Tionghoa untuk menjadi orang Indonesia, sedangkan integrasi adalah kewajiban setiap bangsa Indonesia sebagai bukti loyalitas terhadap negaranya.

E. Saran

Keberadaan etnis Tionghoa di suatu wilayah tidak jarang menimbulkan masalah yang berujung konflik berbau rasialis. Konflik ini disebabkan karena prasangka sosial pada pihak pribumi dan perasaan superior di kalangan etnis Tionghoa. Timbulnya permasalahan di Vihara Tri Ratna merupakan bukti bahwa prasangka sosial itu bisa muncul kapan saja. Oleh

karena itu untuk mencegah terjadinya konflik rasialis, maka prasangka dan stereotip negatif tersebut harus dihilangkan.

Konflik antar etnis yang melibatkan etnis Tionghoa, tidak hanya menjadi hambatan bagi kelangsungan asimilasi tetapi juga bisa mengancam integrasi nasional. Pemerintah Kota Tanjungbalai hendaknya bersikap tegas dan memiliki komitmen untuk sesegara mungkin menyelesaikan setiap permasalahan terkait etnis. Karena masyarakat Kota Tanjungbalai bersifat multi-etnis, maka dalam penyelesaian masalah hendaknya melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama para tokoh agama, tokoh adat (etnis), dan organisasi sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 1985. *Imagined Communities, Reflections, on the Original Spread of Nationalism*, London: Verso Edition.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dawis, Aimee, 2009, *Orang Indonesia Mencari Identitas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Idi, Abdullah, 2009, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Liliweri, Alo, 1994, "Prasangka Sosial dan Komunikasi Antar-etnik", Jakarta: *Majalah Prisma* No.12/1994.
- Lofland & Lofland, 1984, *Analyzing Social Setting; A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal: Wads Worth Publishing Company.
- Patji, Abdul Rachman, 2010, "Asimilasi, Akulturasi, dan Perubahan Masyarakat Indonesia", (Makalah) disampaikan pada diskusi *Desain Kebudayaan Nusantara*, April 2010, Jakarta: TMII.
- Poerwanto, Hari, 2003, "Orang Cina di Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional", (Teks Pidato) Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta: UGM.
- _____, 2006, "Hubungan Antar Suku-Bangsa dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional", (Makalah) Pada Focus Group Discussion/ FGD, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Rupert Emerson, 1962, *From Impire to Nation: The Rise of The Assertion of Asian and African People*, Boston : Beacon Press.
- Schermerhorn, R., 1970, *Comperative Ethnic Relations: Framework for Theory and Research*, New York: Random House.
- Suhandinata, Justian, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadinata, Leo, 2002, *Negara dan Etnis Tiongha; Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2009, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2010, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

- Idi, Abdullah, 2009, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Liliweri, Alo, 1994, "Prasangka Sosial dan Komunikasi Antar-etnik", Jakarta: *Majalah Prisma* No.12/1994.
- Lofland & Lofland, 1984, *Analyzing Social Setting; A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmon, Cal: Wads Worth Publishing Company.
- Patji, Abdul Rachman, 2010, "Asimilasi, Akulturasi, dan Perubahan Masyarakat Indonesia", (Makalah) disampaikan pada diskusi *Desain Kebudayaan Nusantara*, April 2010, Jakarta: TMII.
- Poerwanto, Hari, 2003, "Orang Cina di Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional", (Teks Pidato) Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta: UGM.
- _____, 2006, "Hubungan Antar Suku-Bangsa dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional", (Makalah) Pada Focus Group Discussion/FGD, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Rupert Emerson, 1962, *From Impire to Nation: The Rise of The Assertion of Asian and African People*, Boston : Beacon Press.
- Schermerhorn, R., 1970, *Comperative Ethnic Relations: Framework for Theory and Research*, New York: Random House.
- Suhandinata, Justian, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadinata, Leo, 2002, *Negara dan Etnis Tiongha; Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2009, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2010, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

